



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan persyaratan khusus bagi Calon Kepala Seksi Kesejahteraan, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bebas narkoba; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Calon Kepala Seksi Kesejahteraan yakni wajib memiliki sertifikat/ piagam pelatihan pelayanan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus memperoleh Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak menerima Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDes.
 - (7) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengajukan cuti dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (8) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lulus seleksi, yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri dari anggota BPD kepada Bupati melalui Camat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - (9) Bagi anggota TNI/ Polri yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), juga mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Syarat administrasi calon Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil diatas kertas bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan unsur Staf, atau surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun di atas kertas bermeterai cukup;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi;
 - o. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - q. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 = 10 lembar;
 - r. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD; dan
 - s. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - t. surat izin tertulis dari atasan bagi anggota TNI/ Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan selanjutnya disebut bakal calon Perangkat Desa.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berbasis *Computer*.
- (2) Seleksi berbasis *Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis tes yaitu :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
 - d. Tes Kompetensi Bidang (TKB).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga.

- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembaga/ instansi pemerintah yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Harian.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Harian.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
- (3) Mutasi jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa.
- (4) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam mutasi jabatan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dari Kepala Desa diterima.
- (6) Dalam hal Kepala Desa melakukan mutasi Perangkat Desa pada jabatan Kepala Seksi kesejahteraan, maka Perangkat Desa yang akan menduduki jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan wajib memiliki sertifikat/ piagam pelatihan pelayanan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- (8) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat Desa hasil mutasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 70